PEDOMAN PENGELOLAAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR)

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DIREKTORAT BINA KETAHANAN REMAJA
JAKARTA, 2012

PEDOMAN
PENGELOLAAN BINA KELUARGA REMAJA
(BKR)

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DIREKTORAT BINA KETAHANAN REMAJA
JAKARTA, 2012

KATA SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena telah memberikan kepada kita kemampuan, kesempatan dan sumber daya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan/penyempurnaan Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR). Pedoman ini merupakan acuan bagi para Pengelola Program GenRe, Pelaksana, dan Kader untuk membentuk, mengembangkan dan membina kelompok BKR, mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan, serta Kelurahan dan Desa.

Penyempurnaan buku Pedoman ini dilakukan karena tuntutan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan karena penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014, program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) telah kita sepakati untuk dikembangkan menjadi program Generasi Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Untuk mewujudkan Generasi Berencana di Indonesia, program GenRe dihadapkan dengan lingkungan strategik, yang berkembang dengan sangat pesat dan cepat. Salah satu diantaranya adalah globalisasi informasi yang kemudian tanpa disadari, telah meliberalisasi dan merubah norma, etika dan moralitas agama, menjadi nilai-nilai kehidupan sekuler.

Dalam kehidupan remaja perubahan nilai ini, terlihat dari perilaku hidup remaja yang tidak sehat *(unhealthy life behaviors)*.

Apabila perilaku remaja yang tidak sehat ini terus berlangsung, tentu akan mengganggu tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan kehidupan remaja, baik secara individual maupun

sosial. Program BKR telah dibentuk di beberapa provinsi, namun akhir-akhir ini mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan pendataan keluarga BKKBN tahun 2011, terdapat 5.853.561 keluarga yang memiliki remaja usia 10 – 24 tahun dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah yang banyak itulah yang menjadi sasaran program BKR. Karena itu, saya menyambut baik diterbitkannya Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang telah mengalami penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Pedoman ini sangat penting, karena menjadi Pedoman dan petunjuk dalam pembentukan, pengembangan dan pembinaan kelompok BKR di berbagai tingkatan, dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat langsung dalam Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR).

Kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyempurnaan dan penerbitan Pedoman ini, saya sampaikan ucapan terima kasih. Akhirnya, semoga penyempurnaan Pedoman ini dapat menjadi bagian dari amal bakti kita dalam mempromosikan Generasi Berencana, guna mewujudkan "Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera" dalam rangka mencapai "Penduduk Tumbuh Seimbang 2015".

Jakarta, 30 April 2012
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga

Dr. Sudibyo Alimoeso, MA

KATA PENGANTAR
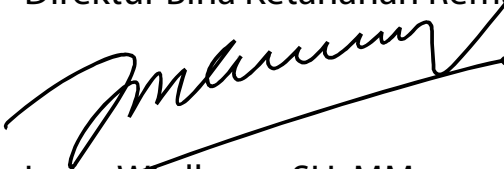
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat dan karuniaNya Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat diselesaikan dan dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 109/PER/F2/2012 tanggal 30 April 2012.

Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Direktorat Bina Ketahanan Remaja merupakan salah satu direktorat di bawah Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, yang memiliki tugas antara lain melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pemantauan dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis fasilitasi di bidang Bina Ketahanan Remaja.

Untuk mendukung terlaksananya program GenRe secara optimal di semua tingkatan, perlu dibuat pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan program GenRe. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) guna mewujudkan tujuan program GenRe.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini hingga diterbitkannya, kami mengucapkan terima kasih. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di masa yang akan datang.

Jakarta, 30 April 2012
Direktur Bina Ketahanan Remaja,

Indra Wirdhana, SH, MM

DAFTAR ISI

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 109/PER/F2/2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BINA KELUARGA REMAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelola Bina Keluarga Remaja dalam menumbuhkembangkan Bina Keluarga Remaja;

b bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838;

3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasai Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi;

12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BINA KELUARGA REMAJA .

KESATU : Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman ini merupakan acuan bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Kader BKR dalam Pengelolaan Bina Keluarga Remaja.

KETIGA : Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Buku Panduan Pengelolaan Bina Keluarga Anak dan Remaja yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Ketahanan Keluarga Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT	Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 April 2012
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 109/PER/F2/2012

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BINA KELUARGA REMAJA
(BKR)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja dan permasalahannya menjadi isu penting saat ini. Jumlah yang besar, yaitu sekitar 64 juta atau 27,6% dari jumlah penduduk Indonesia (Sensus Penduduk, 2010) mengakibatkan remaja memerlukan perhatian besar dalam pembinaannya. Disamping itu remaja sangat rentan terhadap resiko Triad KRR (Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS). Perilaku seksual yang tidak sehat dikalangan remaja, khususnya remaja yang belum menikah cenderung meningkat. Data dari Departemen Kesehatan tahun 2009 menunjukkan bahwa 35,9% remaja di empat kota besar (Medan, Jakarta Pusat, Bandung, dan Surabaya) mempunyai teman yang sudah pernah melakukan hubungan seks pranikah dan 6,9% responden telah melakukan hubungan seks pranikah.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional tahun 2008, menunjukkan bahwa pengguna NAPZA sampai dengan tahun 2008 adalah 115.404 kasus, dimana 51.986 kasus dari total pengguna adalah mereka yang berusia remaja (16 – 24 tahun). Diantara pengguna remaja tersebut terdiri dari pelajar sekolah berjumlah 5.484 kasus dan mahasiswa berjumlah 4.055 kasus. Untuk kasus AIDS 49,5% diantaranya adalah kelompok usia 20 – 29 tahun (Kemenkes RI, 2011). Jika dikaitkan dengan karakteristik AIDS yang gejalanya baru muncul setalah 3 – 10 tahun terinfeksi, maka hal ini semakin membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka yang terkena AIDS telah terinfeksi pada usia yang lebih muda.

Pemasalahan remaja seperti diuraikan diatas sangat kompleks dan mengkhawatirkan. Permasalahan tersebut akan mengurangi kesempatan remaja untuk mempraktekkan perilaku hidup sehat, serta mengganggu perencanaan kehidupan di masa yang akan datang. Untuk merespon permasalahan tersebut, berbagai pendekatan dilakukan oleh pemerintah. BKKBN dalam hal ini sebagai salah satu instansi pemerintah, merespon melalui Pengembangan Program Generasi Berencana (GenRe).

Program GenRe dilaksanakan melalui pendekatan dari dua sisi, yaitu pendekatan kepada remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), sedangkan pendekatan kepada keluarga dilakukan melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Pendekatan kepada remaja dan keluarga didasari oleh hasil Survey Demografi Kependudukan Indonesia (SDKI, 2003), yang menunjukkan bahwa remaja lebih menyukai untuk menceritakan permasalahannya kepada teman sebaya (71%), dan kepada orangtua (31%). Meskipun remaja lebih memilih menceritakan permasalahan kepada teman sebayanya, namun peran keluarga tetap penting karena remaja masih dalam pembinaan dan pengasuhan orangtua, dimana pembentukan karakter remaja dimulai dari keluarga.

Dari berbagai data menunjukkan bahwa keluarga melalui pola asuh orangtua, telah diidentifikasi sebagai pengaruh yang sangat penting dalam pembentukan karakter remaja, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Proses pola asuh orangtua meliputi kedekatan orangtua dengan remaja, pengawasan orangtua, dan komunikasi orangtua dengan remaja. Melalui komunikasi, orangtua hendaknya

menjadi sumber informasi dan pendidik utama tentang kesehatan reproduksi remaja, juga tentang perencanaan kehidupan remaja di masa yang akan datang. Namun demikian, orangtua sering menghadapi kendala dalam berkomunikasi kepada remajanya, begitupun sebaliknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Melalui kelompok BKR setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja, meliputi Kebijakan Program GenRe, Penanaman Nilai-Nilai Moral Melalui 8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS, Keterampilan Hidup, Ketahanan Keluarga Berwawasan Gender, Komunikasi Efektif Orangtua terhadap Remaja, Peran Orangtua Dalam Pembinaan Tumbuh Kembang Remaja, Kebersihan dan Kesehatan Diri Remaja, dan Pemenuhan Gizi Remaja.

Kelompok Bina Keluarga Remaja ini telah dikembangkan di seluruh Provinsi Indonesia, dan sampai dengan Desember 2011 telah berkembang sebanyak 33.779 kelompok. Jumlah yang banyak tersebut perlu dikelola dan dibina secara berkesinambungan, sehubungan dengan hal ini maka diperlukan suatu pedoman yang menjadi acuan atau pegangan bagi pengelola Program GenRe di semua tingkatan dan Pengelola BKR (kader).

B. Dasar Hukum

Untuk merespon permasalahan remaja tersebut, pemerintah melakukan berbagai program dan kegiatan yang disebar ke

instansi berkaitan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam pasal 48 ayat (1) pada huruf b menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Peningkatan kualitas remaja melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh BKKBN.
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
3. Peraturan Kepala BKKBN nomor 72/PER/B5/2011 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi.
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka mengemban amanat undang-undang dan merespon permasalahan remaja, BKKBN mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) bagi Remaja dan keluarga yang memiliki remaja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dilaksanakan oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja (Dithanrem). Program ini didasarkan pada

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/HK.010/B5/2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2010 - 2014 dan Addendum Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 133/PER/B1/2011 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010 -2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam adendum tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19.8 (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun.
2. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dari 1.5 juta menjadi 2.7 juta keluarga remaja.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

   Buku Pedoman ini disusun bertujuan untuk dijadikan pegangan/acuan bagi pengelola program dan pengelola BKR (kader) dalam rangka menumbuhkembangkan BKR.

2. Tujuan Khusus

   a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Pembina dan Pengelola BKR, dalam menumbuhkembangkan BKR (Dasar, Berkembang, Paripurna).

   b. Meningkatkan kualitas pelayanan kelompok BKR.

   c. Mewujudkan kelompok BKR Paripurna.

d. Meningkatkan jumlah keluarga yang memiliki remaja yang aktif dalam kegiatan kelompok BKR.

e. Memperluas jejaring kerja didalam pengelolaan BKR.

D. Sasaran Pengguna

Sasaran yang terkait dengan penggunaan buku pedoman ini adalah :

1. Pengelola Program GenRe
2. Pengelola Kelompok BKR (Kader)

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman BKR terdiri dari penyelenggaraan kegiatan BKR dan Pengembangan Kegiatan BKR. Adapun penyelenggaraan kegiatan BKR meliputi pembentukan kelompok BKR, peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana, pelayanan kegiatan kelompok BKR. Sedangkan pengembangan kegiatan BKR meliputi pemasaran kegiatan kelompok BKR, pengembangan model keterpaduan kegiatan BKR, serta pemantapan kegiatan BKR.

F. Batasan Pengertian

Untuk memberikan pemahaman dan presepsi yang sama dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja (BKR), maka perlu diberikan batasan pengertian hal-hal sebagai berikut :

1. Program Generasi Berencana (GenRe) adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang

diarahkan untuk mencapai Tegar Remaja/Mahasiswa agar menjadi Tegar Keluarga demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
3. Remaja adalah Orang Muda (Young people) yaitu penduduk usia 10–24 tahun (UNFPA dan WHO). Remaja sebagai sasaran program GenRe adalah penduduk usia 10-24 tahun yang belum menikah.
4. Keluarga Remaja adalah keluarga yang memiliki anak remaja usia 10-24 tahun, dan belum menikah.
5. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10 – 24 tahun. BKR bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan , pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok.
6. Pengelola Program GenRe adalah pejabat struktural dan fungsional mulai dari Tingkat Pusat yaitu Deputi KSPK, Direktur Bina Ketahanan Remaja; Tingkat Provinsi yaitu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, Kabid KSPK, Kasubbid Bina Ketahanan Remaja; Tingkat Kabupaten dan Kota yaitu Kepala SKPD KB, Eselon III dan Eselon IV yang menangani program Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera; Tingkat Kecamatan yaitu KUPTD/PPLKB/Koordinator Lapangan PLKB/PKB; serta pada tingkat desa dan kelurahan yaitu PLKB/PKB yang secara fungsional bertanggungjawab

terhadap pengelolaan program GenRe yaitu pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan pengelolaan PIK R/M.

7. Pengelola adalah orang atau lembaga yang menaruh minat dan melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan penilaian suatu program atau kegiatan.

8. Kader BKR adalah anggota masyarakat yang melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja secara sukarela, dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua tentang cara mengasuh dan membina anak remajanya dengan baik dan benar.

9. Pertumbuhan adalah proses perubahan dari segi fisik secara normal dalam perjalanan waktu tertentu, yang meliputi pertumbuhan berat dan tinggi badan sesuai dengan umurnya.

10. Perkembangan adalah proses perubahan yang teratur dari satu tahap perkembangan ke tahap selanjutnya, meliputi perilaku, mental, emosi, moral, sosial, dan keterampilan.

11. Pengasuhan adalah kemampuan suatu keluarga atau rumah tangga dan komunitas dalam memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan.

12. Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural.

13. TRIAD KRR adalah tiga risiko yang dihadapi oleh remaja/mahasiswa, yaitu risiko-risiko yang berkaitan dengan Seksualitas, Napza, HIV dan AIDS.
14. Seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai mahluk seksual, yaitu emosi, perasaan, kepribadian, sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual, hubungan seksual dan orientasi seksual.
15. HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia.
16. AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immuno Deficiency Syndrome,* yaitu sekumpulan gejala yang timbul akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh, karena terinfeksi virus HIV.
17. Napza adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, yaitu zat-zat kimiawi yang dimasukkan kedalam tubuh manusia baik secara oral (melalui mulut), dihirup (melalui hidung) atau disuntik yang menimbulkan efek tertentu terhadap fisik, mental dan ketergantungan.
18. Keterampilan Hidup *(Life Skills)* adalah pendidikan non formal yang berkaitan dengan keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, keterampilan kejuruan dan keterampilan menghadapi kesulitan.
19. Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama saat mencapai usia minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

20. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran dan penyampaian informasi, sikap, pikiran, atau perasan melalui bahasa, pembicaraan, pendengaran, gerak tubuh atau ungkapan emosi.
21. Komunikasi orangtua dan remaja adalah informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator (orangtua) kepada komunikan (remaja) yang mencakup penyampaian nilai, standar, dan sikap orangtua mengenai suatu isu.
22. KIE adalah kegiatan penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

BAB II

PENGELOLAAN BINA KELUARGA REMAJA

A. Kebijakan dan Strategi

1. Kebijakan

    a. Pembentukan dan pengembangan BKR

    b. Peningkatan kualitas pengelola BKR

    c. Peningkatan komitmen dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pengelolaan BKR

    d. Peningkatan pelayanan BKR yang berintegrasi dengan kegiatan PIK R/M

    e. Penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola BKR

2. Strategi

    a. Melakukan advokasi tentang penumbuhan dan pengembangan BKR

    b. Melakukan promosi dan sosialisasi tentang BKR

    c. Menyediakan dukungan anggaran bagi kegiatan BKR, baik dari dana APBN, APBD, maupun dari sumber dana lainnya

    d. Melaksanakan pelatihan dan orientasi bagi SDM Pengelola BKR

    e. Mengembangkan materi substansi BKR sesuai dengan kebutuhan keluarga remaja

f. Memilih dan mengembangkan kelompok BKR Paripurna Model

g. Memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pendukung kelompok BKR

h. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang

B. Kegiatan-kegiatan dalam Pengelolaan Bina Keluarga Remaja

Pengelolaan Kegiatan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan mengacu pada Pedoman Operasional Program Ketahanan Keluarga. Pengembangan kegiatan, materi, dan media dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan muatan lokal di setiap wilayah.

Pokok-pokok kegiatan dalam Pengelolaan Kegiatan Bina Keluarga Remaja meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

Kegiatan BKR bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orangtua dalam melakukan pembinaan terhadap remaja. Di samping itu, kegiatan ini diarahkan pula untuk dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota BKR. Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara efektif, maka perlu diperhatikan pokok-pokok kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan kelompok BKR yang meliputi pembentukan kelompok, peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana serta pelayanan kegiatan BKR seperti berikut ini :

a. Pembentukan kelompok BKR

Pelaksanaan kegiatan pembentukan kelompok BKR dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Identifikasi potensi dan masalah
2) Penggalangan kesepakatan
3) Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
4) Menyiapkan sumber daya

b. Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana

Untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan pelaksana perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1) *Training of trainer* (TOT)
2) Workshop / Orientasi

c. Pelayanan kegiatan kelompok BKR

Rangkaian pelayanan kegiatan kelompok BKR adalah seperti berikut ini :

1) Pertemuan penyuluhan
2) Tata Cara Penyuluhan
3) Kunjungan rumah
4) Rujukan

b. Pengembangan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

Pengembangan kegiatan kelompok BKR dilakukan berdasarkan stratifikasi kelompok sebagai berikut :

a. Stratifikasi Dasar

b. Startifikasi Berkembang

c. Stratifikasi Paripurna

c. Pendekatan dalam Pengembangan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

Pengembangan kegiatan kelompok BKR dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

a. Promosi kegiatan kelompok BKR

Pemahaman tentang pentingnya kegiatan BKR perlu dimiliki oleh setiap pengelola dan pelaksana program KB, lintas sektor terkait, kader serta seluruh keluarga yang memiliki anak remaja. Mengingat pentingnya penyebarluasan pemahaman tentang kegiatan BKR, maka perlu dilakukan kegiatan promosi.

b. Pengembangan Model Keterpaduan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

Penyelenggaraan kegiatan BKR yang telah berjalan selama ini dapat dikembangkan dengan berbagai model penyelenggaraan. Bentuk pengembangan yang dilakukan antara lain dapat berupa penambahan/pengembangan materi, pelayanan terpadu dengan institusi yang menangani remaja, baik program maupun kegiatan serta integrasi dengan kegiatan yang ada pada organisasi wanita, keagamaan dan LSOM lainnya.

d. Pemantapan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

Kegiatan kelompok BKR yang belum dilaksanakan secara merata di berbagai tingkatan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian kualitas pembinaan

anak remaja yang belum optimal. Untuk itu, diperlukan upaya pemantapan kegiatan BKR yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

a. Pemantapan jejaring kerja

b. Pembinaan kelompok BKR

c. Peningkatan kualitas kegiatan kelompok BKR

e. Langkah-langkah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan pokok pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja, maka diperlukan langkah-langkah kegiatan pada setiap tingkatan, yaitu :

a. Tingkat Pusat

1) Penggalangan Kesepakatan

2) Pembentukan Forum

3) Penyusun Perencanaan

4) Penyusunan Pedoman BKR

5) Penyusunan Materi dan Media BKR

6) Pelatihan dan Orientasi

7) Pengembangan dan Pelaksanaan Sosialisasi

8) Pemantauan dan Evaluasi

b. Tingkat Propinsi

1) Penggalangan kesepakatan dan operasional di tingkat propinsi.

2) Tingkat propinsi dan kabupaten/kota dapat menindaklanjuti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

3) Penyusunan Perencanaan

4) Orientasi/pelatihan

5) Menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan kelompok BKR baik bagi petugas/pengelola, Fasilitator, kader maupun untuk orangtua.

6) Penyusunan Materi dan Media BKR

7) Pengembangan dan Pelaksanaan KIE BKR

8) Pemantauan dan Evaluasi

c. Tingkat Kabupaten dan Kota

1) Penggalangan kesepakatan dan operasional di tingkat kabupaten/kota

2) Pembentukan forum tingkat kabupaten

3) Penyusunan Perencanaan

4) Orientasi/pelatihan

5) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKR.

6) Menyusun dan memproduksi materi dan media BKR.

7) Pengembangan dan pelaksanaan KIE BKR

8) Pemantauan dan Evaluasi

d. Tingkat kecamatan

1) Penggalangan kesepakatan

2) Pembentukan tim operasional

3) Orientasi petugas dan kader

4) Pendataan calon anggota kelompok BKR

5) Penyusunan rencana kegiatan
6) Pencatatan, pelaporan dan evaluasi
7) Pembinaan dan pengembangan

e. Tingkat Desa/Kelurahan
1) Penggalangan kesepakatan
2) Pembentukan tim pelaksana tingkat desa/kelurahan
3) Orientasi tim pelaksana dan kader
4) Pendataan calon anggota BKR
5) Pembuatan jadwal kegiatan
6) Pembentukan kelompok BKR
7) Pelaksanaan kegiatan
8) Pencatatan dan Pelaporan
9) Pembinaan

f. Pengelolaan Kelompok
1) Kader BKR
2) Tugas Kader BKR
3) Anggota kelompok BKR
4) Pengelola kelompok BKR
5) Pembentukan kelompok BKR
6) Kegiatan kelompok BKR

g. Pengorganisasian Kelompok Bina Keluarga Remaja
1) Tingkat Pusat

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan BKR, perlu dibentuk Forum BKR tingkat Pusat.

a) Susunan kepengurusan diserahkan kepada kesepakatan anggota yang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- Ketua : Deputi KSPK
- Wakil ketua : Ketua Umum Tim Penggerak PKK
- Sekretaris : Direktur Bina Ketahanan Remaja
- Anggota :
  - Kemenkokesra
  - Kemendikbud
  - Kemenag
  - Kemenkes
  - Kemensos
  - Kemenpora
  - Kemen PP dan PA
  - Kemen Perencanaan Nasional/ Bappenas
  - dan lain-lain

b) Tugas dan fungsi Forum BKR Tingkat Pusat disarankan sebagai berikut:

- Menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi yang ditetapkan kedalam langkah-langkah kegiatan operasional.
- Mengembangkan materi dan media BKR
- Mengembangkan KIE BKR.

- Mengembangkan kegiatan-kegiatan pendukung dalam rangka pemantapan kelembagaan BKR.
- Melakukan monitoring dan supervisi kegiatan BKR.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan BKR secara berkala.

2) Tingkat Provinsi

a) Keanggotaan forum BKR Provinsi disarankan terdiri dari anggota sebagai berikut:

- Pembina : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
- Ketua : SKPD KB Provinsi
- Wakil ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi
- Sekretaris : Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Provinsi
- Anggota :
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - Dinas Kesehatan
  - Dinas Sosial
  - Badan PP & PA
  - Kanwil Kemenag
  - Bappeda

b) Tugas dan fungsi forum BKR tingkat Provinsi disarankan sebagai berikut:

- Menjabarkan kebijakan operasional pelaksanaan kegiatan BKR tingkat Provinsi.
- Menyusun pelaksanaan kegiatan BKR tingkat Provinsi.
- Melakukan monitoring dan supervisi kegiatan BKR.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan BKR secara berkala.
- Melaporkan perkembangan kegiatan BKR secara berkala.
- Melaporkan perkembangan kegiatan BKR tiap 3 bulan sekali kepada forum BKR tingkat pusat.

3) Tingkat Kabupaten dan Kota

a) Keanggotaan forum BKR tingkat Kabupaten dan Kota disarankan sebagai berikut:

- Pembina : Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota
- Ketua : Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kabupaten dan Kota
- Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kota
- Sekretaris : Eselon IV yang menangani kegiatan BKR

- Anggota :
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    - Dinas Kesehatan
    - Dinas Sosial
    - Badan PP & PA
    - Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota
    - Bappeda

b) Tugas dan fungsi forum BKR tingkat Kabupaten/Kota disarankan sebagai berikut:

- Menyusun rencana operasional kegiatan BKR Kabupaten/Kota.
- Melakukan monitoring dan supervisi kegiatan BKR.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan BKR secara berkala.
- Melaporkan perkembangan kegiatan tiap 4 bulan sekali kepada Pokja BKR tingkat Provinsi.

4) Tingkat Kecamatan

a) Tim Operasional BKR dengan susunan kepengurusan diserahkan kepada kesepakatan anggota, disarankan sebagai berikut :

- Ketua : Pengawas/Koordinator/ KUPTD KB
- Sekretaris : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan

- Anggota :
  - Pendidikan dan Kebudayaan
  - Puskesmas
  - Kantor Urusan Agama
  - Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

b) Tugas dan fungsi Tim Operasional BKR disarankan sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan BKR tingkat Kecamatan.
- Memberikan petunjuk teknis kepada pelaksana di tingkat Desa.
- Membimbing dan memonitor pelaksanaan kegiatan BKR.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan BKR kepada forum BKR tingkat Kabupaten/Kota setiap 2 bulan sekali.

5) Tingkat Desa

a) Susunan kepengurusan Tim pelaksana BKR tingkat desa/kelurahan disarankan sebagai berikut:

- Ketua : PLKB
- Sekretaris : Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dan Desa
- Anggota :
  - Tokoh agama
  - Tokoh Masyarakat

- Ketua RW
- Ketua RT
- Kader
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat

b) Tugas dan fungsi Tim pelaksana BKR di desa/kelurahan disarankan sebagai berikut:

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKR.
- Pelaksanaan kegiatan BKR.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan BKR kepada TOP BKR Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN BINA KELUARGA REMAJA

A. Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok Bina Keluarga Remaja

1. Pembentukan kelompok BKR

   Prosedur pembentukan kelompok BKR dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

   a. Identifikasi potensi dan permasalahan

      Pengelola program KB di wilayah setempat melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk kemudian menentukan prioritas masalah yang akan di tangani dengan cara :

      1) Mengidentifikasi potensi wilayah untuk memetakan potensi yang dimiliki suatu daerah, antara lain meliputi : jumlah kader yang ada; jumlah remaja; jumlah pasangan usia subur (PUS) yang memiliki anak remaja (ber-KB dan tidak ber-KB); jumlah ibu hamil (Bumil); ketersediaan ruangan untuk kegiatan pertemuan; sarana BKR,

      2) Mengidentifikasi masalah yang menjadi penghambat belum terbentuknya kelompok kegiatan BKR misalnya: keterbatasan kader; kurangnya keterampilan kader; kurangnya kesadaran orangtua/anggota keluarga yang memiliki anak remaja dan kurangnya kepedulian

tokoh masyarakat tentang pentingnya kelompok BKR,

3) Menentukan prioritas masalah dari berbagai masalah yang ditemui dan harus segera ditangani.

b. Menggalang kesepakatan

Setelah para Toga/Toma memiliki pemahaman sebagai hasil dari KIE/sosialisasi, selanjutnya pengelola program KB melakukan penggalangan kesepakatan untuk membentuk kelompok BKR sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal yang perlu disepakati antara lain menentukan model kegiatan BKR tersebut merupakan kegiatan tersendiri (khusus) atau akan dipadukan dengan kegiatan lain yang sudah ada dan kegiatan yang dapat menunjang kesinambungannya.

c. Pelaksanaan KIE

Berdasarkan hasil identifikasi dan penentuan prioritas masalah, selanjutnya pengelola program KB melakukan KIE/sosialisasi kepada tokoh formal dan informal (tokoh agama/toga dan tokoh masyarakat/toma) setempat tentang adanya permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembinaan anak remaja di wilayah setempat serta pentingnya kegiatan kelompok BKR. Kegiatan ini bertujuan agar para tokoh dimaksud dapat memberikan dukungan sepenuhnya, baik dalam pembentukan kelompok BKR maupun dalam operasionalisasi kegiatan sekaligus menjaring tokoh-tokoh/individu yang bersedia menjadi pengelola kelompok BKR.

d. Menyiapkan sumber daya

   Kegiatan BKR akan dapat berjalan lancar jika didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang perlu dipersiapkan oleh pengelola program KB yaitu tenaga pengelola yang akan menjadi pengurus kelompok BKR dan sejumlah kader yang akan bertugas pada kelompok BKR akan memberikan penyuluhan kepada orangtua/anggota keluarga. Kader diambil dari anggota masyarakat setempat yang bersedia secara sukarela membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua/anggota keluarga. Jumlah kader dalam setiap kelompok minimal 3 orang.

2. Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana

   Untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan pelaksana perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :

   a. *Training of trainer* (TOT)

      TOT bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengelola dalam meningkatkan kualitas kelompok BKR. Sasaran TOT ini adalah mitra kerja, fungsional, dan pengelola program GenRe, pelatih, dll.

   b. Workshop / Orientasi

      Workshop / orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam membina dan mengelola kelompok BKR. Sasaran workshop / orientasi ini adalah tim penggerak PKK dan lintas sektor.

3. Pelayanan kegiatan kelompok BKR

   Rangkaian pelayanan kegiatan kelompok BKR adalah seperti berikut ini :

a. Pertemuan penyuluhan

    1) Pertemuan penyuluhan dilakukan minimal 1 bulan sekali

    2) Waktu dan tempat penyuluhan disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok.

b. Tata Cara Penyuluhan

    1) Pembukaan

        a) Mengisi waktu menunggu sampai dengan 60% peserta datang

        b) Memperkaya pengalaman peserta dengan kegiatan yang menarik. Misalnya membahas topik aktual berkaitan dengan remaja, seperti penculikan remaja.

        c) Membahas kembali materi dan Pekerjaan Rumah (PR) pertemuan sebelumnya.

        d) Menanyakan kesertaan ber KB

        e) Beri kesempatan dulu kepada orangtua yang kurang berani atau lancar berpartisipasi

    2) Inti

        a) Penjelasan tentang materi baru

        b) Sesuaikan dengan topik/materi untuk kelompok orangtua

        c) Diskusikan tentang materi yang dibahas

        d) Berbagi pengalaman antar orangtua tentang permasalahan dan cara menghadapi remajanya

e) Gunakan gambar atau alat bantu dalam membahas materi tertentu

3) Penutup

a) Kesimpulan hasil pertemuan

- Penegasan untuk pemantapan pengetahuan
- Mempraktikkan dan mendiskusikan dengan remajanya tentang materi yang telah diperoleh dari pertemuan.

b) Penentuan PR untuk pertemuan yang akan datang

- Tujuannya untuk memantapkan materi yang baru dibahas dan didiskusikan dengan remajanya, berdasarkan pengalaman pribadi dalam keluarga masing-masing.
- PR sebaiknya ditentukan atas usul peserta

c) Pengisian laporan

- Pengisian laporan dilakukan oleh kader dibawah pengawasan kader pembantu

d) Pertemuan khusus dengan kader

- Jika terdapat permasalahan orangtua yang membutuhkan pertemuan yang bersifat pribadi, maka diberi kesempatan bagi orangtua untuk bertemu kader.
- Membantu orangtua menyelesaikan masalah dengan merujuk ke tempat rujukan sesuai dengan permasalahan.

Misalnya ke psikolog, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Puskesmas, dll.

c. Kunjungan rumah

Kunjungan rumah dilakukan apabila anggota kelompok BKR dua kali berturut-turut tidak hadir dalam pertemuan kelompok BKR.

d. Rujukan

Rujukan dilakukan apabila kader tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orangtua anggota kelompok BKR. Adapun tempat rujukan ke psikolog, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Puskesmas, Rumah Sakit, dll

B. Pengembangan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

Pengembangan kegiatan kelompok BKR dilakukan berdasarkan stratifikasi kelompok sebagai berikut (formulir stratifikasi terlampir) :

1. Stratifikasi Dasar
   a. Belum ada aspek legalitas
   b. Pengurus 1 orang
   c. Kader 2 orang
   d. Kader terlatih 1 orang
   e. Penyuluhan 1 kali sebulan
   f. Memiliki buku pedoman
   g. Memiliki buku registrasi anggota
   h. Memiliki buku kegiatan kelompok

2. Startifikasi Berkembang
    a. Memiliki papan nama dengan ukuran minimal 60x90 cm
    b. Memiliki jadwal pertemuan
    c. Sudah ada aspek legalitas
    d. Pengurus 2 orang
    e. Kader 3 orang
    f. Kader terlatih 2 orang
    g. Penyuluhan 2 kali sebulan
    h. Memiliki buku pedoman
    i. Memiliki buku registrasi anggota
    j. Memiliki buku kegiatan kelompok
    k. Memiliki media penyuluhan
    l. Memanfaatkan media BKR
    m. Memiliki sumber dana
3. Stratifikasi Paripurna
    a. Memiliki papan nama dengan ukuran minimal 60x90 cm
    b. Memiliki jadwal pertemuan
    c. Sudah ada aspek legalitas
    d. Pengurus 3 orang
    e. Kader 4 orang
    f. Kader terlatih 3 orang
    g. Penyuluhan 2 kali sebulan

h. Memiliki dan mengembangkan buku pedoman
i. Memiliki buku registrasi anggota
j. Memiliki buku kegiatan kelompok
k. Memiliki media penyuluhan
l. Memanfaatkan media BKR
m. Mengembangkan media penyuluhan
n. Mengembangkan media BKR
o. Memiliki keterpaduan dengan kegiatan lainnya
p. Memiliki kegiatan yang terintegrasi dengan PIK R/M
q. Memiliki sumber dana tetap

C. Pendekatan dalam pengembangan kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja

Pengembangan kegiatan kelompok BKR dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Promosi kegiatan kelompok BKR

   Pemahaman tentang pentingnya kegiatan BKR perlu dimiliki oleh setiap pengelola dan pelaksana program KB, lintas sektor terkait, kader serta seluruh keluarga yang memiliki anak remaja. Mengingat pentingnya penyebarluasan pemahaman tentang kegiatan BKR, maka perlu dilakukan kegiatan promosi.

2. Pengembangan Model Keterpaduan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

   Penyelenggaraan kegiatan BKR yang telah berjalan selama ini dapat dikembangkan dengan berbagai model

penyelenggaraan. Bentuk pengembangan yang dilakukan antara lain dapat berupa penambahan/pengembangan materi, pelayanan terpadu dengan institusi yang menangani remaja, baik program maupun kegiatan serta integrasi dengan kegiatan yang ada pada organisasi wanita, keagamaan dan LSOM lainnya.

D. Pemantapan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

Kegiatan kelompok BKR yang belum dilaksanakan secara merata di berbagai tingkatan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian kualitas pembinaan anak remaja yang belum optimal. Untuk itu, diperlukan upaya pemantapan kegiatan BKR yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantapan jejaring kerja
2. Pembinaan kelompok BKR
3. Peningkatan kualitas kegiatan kelompok BKR

E. Langkah – Langkah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat

   a. Penggalangan Kesepakatan

      Penggalangan kesepakatan dan operasional dalam pengembangan BKR merupakan kegiatan terpadu secara lintas sektoral maupun lintas program yang terkait. Untuk itu diperlukan adanya kesamaan

wawasan dan dukungan dari seluruh sektor terkait disemua tingkatan wilayah. Pembentukan kesepakatan kebijakan program dapat dilakukan melalui pertemuan forum, pertemuan koordinasi, pertemuan kerja dan forum-forum lainnya yang bermanfaat bagi semua pihak.

b. Pembentukan Forum

Untuk mendorong terselenggaranya kegiatan dengan baik perlu diupayakan adanya forum sebagai wadah koordinasi untuk merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program yang akan maupun yang sudah dilaksanakan. Forum ini anggotanya terdiri dari unsur instansi pemerintah, LSM, pemerhati, para pakar bidang kesehatan, pendidikan, psikologi, sosial, dan agama serta ahli lainnya .

c. Penyusun Perencanaan

Perencanaan program dan anggaran dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan BKR dilaksanakan secara terpadu berdasarkan sistem perencanaan yang berlaku.

d. Penyusunan Pedoman BKR

Penyusunan pedoman BKR, pengembangan dan pembinaan kelompok BKR baik bagi petugas/pengelola, fasilitator, kader maupun untuk orangtua.

e. Penyusunan Materi dan Media BKR

Penyusunan materi dan media BKR bagi petugas/pengelola, kader dan fasilitator orangtua yang mempunyai anak remaja.

f. Pelatihan dan Orientasi

   Dalam rangka penyebarluasan informasi dan peningkatan pengetahuan/keterampilan petugas/pengelola, pelaksana BKR mengadakan pelatihan tingkat nasional.

g. Pengembangan dan Pelaksanaan Sosialisasi

   Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk terus menerus meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam BKR. Untuk itu perlu dikembangkan kegiatan dan pesan-pesan KIE yang sesuai dengan situasi dan kondisi kebutuhan wilayah.

h. Pemantauan dan Evaluasi

   Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang dikembangkan, kunjungan lapangan, pertemuan, rapat-rapat, review yang dilaksanakan secara berkala.

2. Tingkat Propinsi

   a. Penggalangan kesepakatan dan operasional di tingkat propinsi dilaksanakan dengan melibatkan instansi dan institusi terkait melalui forum pertemuan yang ada pada tingkat propinsi.

   b. Tingkat propinsi dan kabupaten/kota dapat menindaklanjuti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

   c. Penyusunan Perencanaan

      Perencanaan pengelola program dan anggaran kegiatan BKR dilakukan secara terpadu bersama sektor terkait melalui forum BKR tingkat propinsi.

d. Orientasi/pelatihan

   Dalam rangka desimilasi informasi dan peningkatan pengetahuan keterampilan petugas/pengelola, pelaksanaan BKR maka ditingkat propinsi perlu dilakukan orientasi dan pelatihan BKR.

e. Menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan kelompok BKR baik bagi petugas/pengelola, Fasilitator, kader maupun untuk orangtua.

f. Penyusunan Materi dan Media BKR

   Penyusunan materi dan media BKR bagi petugas/pengelola, kader dan fasilitator orangtua yang mempunyai anak usia 10-24 tahun yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.

g. Pengembangan dan Pelaksanaan KIE BKR

   Kegiatan pelaksanaan KIE dilaksanakan sebagi upaya untuk terus menerus meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BKR. Untuk itu perlu dikembangkan kegiatan dan pesan-pesan KIE yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.

h. Pemantauan dan Evaluasi

   Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang dikembangkan, kunjungan lapangan, pertemuan, rapat-rapat yang dilaksanakan secara periodik.

3. Tingkat Kabupaten dan Kota

   a. Penggalangan kesepakatan dan operasional di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dengan melibatkan

instansi dan institusi terkait dan pakar bidang kesehatan, psikologi dan agama.

b. Pembentukan forum tingkat kabupaten yang terdiri dari unsur instansi dan institusi terkait dan para pakar bidang kesehatan, pendidikan, psikologi dan agama.

c. Penyusunan Perencanaan

   Perencanaan pengelola program kegiatan BKR dilakukan secara terpadu bersama sektor terkait melalui forum pokja BKR tingkat kabupaten dan kota.

d. Orientasi/pelatihan

   Dalam rangka desimilasi informasi dan peningkatan pengetahuan/ keterampilan petugas atau pengelola, pelaksana BKR di tingkat kabupaten/kota perlu dilakukan orientasi dan pelatihan BKR.

e. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKR.

f. Menyusun dan memproduksi materi dan media BKR. Materi dan media BKR ini mencakup materi dan media standar maupun yang dikembangkan sesuai kondisi dan budaya lokal.

g. Pengembangan dan pelaksanaan KIE BKR

   Kegiatan KIE dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan, sosialisasi, seni budaya lokal dan sarana-sarana yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BKR.

h. Pemantauan dan Evaluasi

   Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui pencatatan dan pelaporan, kunjungan lapangan,

pertemuan, rapat-rapat yang dilaksanakan secara periodik.

4. Tingkat kecamatan

   Pengelolaan BKR di tingkat kecamatan dilaksanakan secara terpadu bersama sektor terkait melalui tim operasional BKR dengan langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Penggalangan kesepakatan
   b. Pembentukan tim operasional
   c. Orientasi petugas dan kader
   d. Pendataan calon kelompok BKR
   e. Penyusunan rencana kegiatan
   f. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi
   g. Pembinaan pengembangan

5. Tingkat Desa/Kelurahan

   Kegiatan pengelolaan dan BKR di tingkat desa dilaksanaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Penggalangan kesepakatan
   b. Pembentukan tim pelaksana tingkat desa
   c. Orientasi tim pelaksana dan kader
   d. Pendataan calon anggota BKR
   e. Pembuatan jadwal kegiatan
   f. Pembentukan kelompok BKR
   g. Pelaksanaan kegiatan
   h. Pencatatan dan Pelaporan
   i. Pembinaan

F. Pengelolaan Kelompok

Setelah pendataan keluarga Remaja selesai dilakukan, Tim Pelaksana bersama kader yang telah dilatih membentuk kelompok BKR yang dikelola oleh kader dengan dibantu oleh anggota masyarakat di bawah bimbingan Tim Pelaksana.

1. Kader BKR

   Kader BKR adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua tentang cara mengasuh dan membina remajanya dengan baik dan benar, diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Pendidikan minimum SMP atau yang setara
   b. Tinggal di desa/kelurahan tempat BKR berada
   c. Bersedia mengikuti pelatihan/orientasi
   d. Bersedia dan mampu melaksanakan kegiatan BKR
   e. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan
   f. Mau dan peduli terhadap pembinaan remaja
   g. Selain persyaratan tersebut, diharapkan seseorang menjadi kader adalah berprofesi sebagai guru, rohaniawan/tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain.

2. Tugas Kader

   Seorang kader dalam mengelola kelompok BKR, memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

   a. Melakukan pendataan keluarga yang memiliki remaja.
   b. Memberikan penyuluhan kepada keluarga remaja yang ada di desa untuk ikut aktif menjadi anggota BKR.

c. Menyusun jadwal kegiatan.

d. Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan orangtua yang memiliki remaja dalam kegiatan BKR

e. Menjadi fasilitator dalam pertemuan.

f. Kunjungan rumah apabila diperlukan.

g. Merujuk orangtua remaja yang permasalahannya tidak dapat ditangani oleh kader BKR ke tempat pelayanan yang lebih sesuai dengan permasalahannya, seperti Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau lembaga konsultasi yang lain.

h. Pencatatan dan pelaporan

   Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mendokumentasikan dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan atau aktifitas dari kelompok BKR setiap bulan, menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelompok, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi sampai ke tingkat pusat. Laporan BKR aktif sudah masuk ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN. Adapun alur pencatatan dan pelaporan sebagai berikut:

   1) Pencatatan dan pelaporan BKR di tingkat kelompok harus dilaporkan kepada pengelola tingkat kecamatan pada tanggal 3 setiap bulannya

   2) Pengelola tingkat kecamatan mengelola dan melaporkan ke tingkat kabupaten dan kota pada tanggal 5 setiap bulannya.

3) Pengelola tingkat kabupaten dan kota mengolah dan melaporkan ke provinsi pada tanggal 10 setiap bulannya.

4) Pengelola tingkat provinsi melaporkan kepada pengelola tingkat pusat pada tanggal 15 setiap bulannya.

i. Formulir pencatatan dan pelaporan terdiri dari (formulir terlampir) :

1) Formulir K/0/BKR/10

2) Formulir C/I/BKR/10

3) Formulir F/I/Dal/10

4) Formulir R/I/BKR/10

3. Anggota kelompok BKR

Adalah keluarga yang memiliki anak usia 10-24 tahun yang ikut dalam kegiatan kelompok BKR.

4. Pengelola kelompok BKR

Kelompok BKR di kelola oleh pengurus kelompok minimal 3 orang kader yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota pengurus lainnya.

5. Pembentukan kelompok

Setiap kelompok dapat berjumlah antara 10 - 30 keluarga. Kelompok terdiri dari orangtua yang mempunyai remaja berumur 10-24 tahun.

Pembentukan kelompok dilakukan melalui pendekatan :

a. Kewilayahan

Pembentukan kelompok BKR berdasarkan domisili atau tempat tinggal, dimana keluarga remaja berada.

b. Kelembagaan

   Pembentukan kelompok BKR berdasarkan kelompok kemasyarakatan atau keagamaan yang memiliki anggota keluarga remaja.

6. Kegiatan kelompok BKR

   Kegiatan kelompok BKR pada dasarnya dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi atau kegiatan lain yang dianggap perlu.

   a. Materi pokok Penyuluhan BKR terdiri dari:

      1) Materi Dasar

         a) Program Kependudukan dan KB Nasional

         b) Konsep dasar BKR

      2) Materi Inti

         a) Kebijakan Program GenRe

         b) Penanaman Nilai-Nilai Moral Melalui 8 Fungsi Keluarga

         c) Pendewasaan Usia Perkawinan

         d) Seksualitas

         e) NAPZA

         f) HIV dan AIDS

         g) Keterampilan Hidup

         h) Ketahanan Keluarga Berwawasan Gender

         i) Komunikasi Efektif Orangtua terhadap Remaja

         j) Peran Orangtua Dalam Pembinaan Tumbuh Kembang Remaja

k) Kebersihan dan kesehatan diri remaja

l) Pemenuhan Gizi Remaja

b. Pertemuan Penyuluhan Kelompok

Mekanisme pertemuan penyuluhan kelompok berupa sarasehan dan ceramah yang dihadiri oleh orangtua remaja dan kader.

c. Waktu dan frekuensi penyuluhan

Waktu dan frekuensi kegiatan penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota kelompok. Seluruh materi dasar penyuluhan diharapkan dapat diselesaikan pada pertemuan tersebut. Untuk materi penunjang yang diperlukan oleh anggota disesuaikan dengan kebutuhan. Pertemuan berkala dilakukan setiap 3 sampai 6 bulan setelah pertemuan terakhir.

d. Tempat penyuluhan

Pertemuan tempat penyuluhan dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok.

G. Pengorganisasian Bina Keluarga Remaja

Pelaksanaan untuk tiap tingkatan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat

a. Forum BKR tingkat Pusat membuat kesepakatan operasional dan rencana kegiatan pengembangan BKR, termasuk juknis, jadwal pelaksanaan, anggaran, pembentukan juklak dan bahan materi dan media BKR.

b. Pengawasan, pengendalian serta pemantauan perkembangan kegiatan dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah disepakati.

c. Forum BKR tingkat Pusat membuat umpan balik laporan dari forum tingkat Provinsi secara berkala .

d. Forum tingkat Pusat melakukan bimbingan dan pembinaan terpadu ketingkat administrasi yang lebih rendah.

2. Tingkat Provinsi

   Tugas dan wewenang forum disarankan seperti di bawah ini :

   a. Forum BKR tingkat provinsi membuat kesepakatan operasional bagi pengembangan BKR termasuk jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, anggaran dan pembuatan petunjuk teknis bagi tingkat Kabupaten/Kota.

   b. Pengawasan, pengendalian serta pemantauan, perkembangan kegiatan dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah disepakati.

   c. Forum BKR tingkat provinsi membuat umpan balik laporan dari forum BKR tingkat Kabupaten/Kota secara berkala.

   d. Forum BKR tingkat Provinsi melakukan bimbingan dan pembinaan terpadu ke tinggkat administrasi yang lebih rendah.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

   Disarankan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Forum BKR tingkat Kabupaten/Kota menjabarkan kesepakatan pelaksanaan BKR termasuk jadwal pelaksanaan dan alokasi anggarannya, pembuatan petunjuk teknis bagi tingkat kecamatan.

b. Pemantauan perkembangan kegiatan dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah disepakati.

c. Forum BKR tingkat Kabupaten/Kota operasional tingkat Kecamatan secara berkala.

d. Forum BKR tingkat Kabupaten/Kota melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pengelola pelaksana ditingkat administrasi yang lebih rendah.

4. Tingkat Kecamatan

   Disarankan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

   a. Tim operasional tingkat kecamatan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKR, termasuk jadwal dan alokasi anggarannya, sesuai dengan petunjuk teknis.

   b. Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah disepakati .

   c. Tim operasional tingkat Kecamatan melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pelaksana ditingkat desa.

5. Tingkat Desa / Kelurahan

   Disarankan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

   a. Tim pelaksana tingkat desa/kelurahan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan BKR, termasuk jadwal dan alokasi anggarannya.

b. Tim pelaksana tingkat desa/kelurahan membuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan tingkat desa kepada tim operasional tingkat kecamatan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka menjadikan keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pembangunan bangsa, maka peran dan tanggungjawab orangtua menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan keluarga yang berkulitas. Keluarga yang mempunyai remaja memerlukan perhatian dan penanganan terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu melakukan pembinaan dengan baik dan benar terhadap anak remajanya sebagai generasi pelanjut yang berperilaku sehat, bertanggung jawab, berakhlaq, dan berkualitas serta produktif.

Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman keluarga dalam menanamkan nilai-nilai tentang 8 fungsi keluarga dan tumbuh kembang remaja, maka perlu dibentuk kelompok BKR.

Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kelompok BKR sesuai kondisi di daerah masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2012
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

LAMPIRAN

K/0/BKR/10

1. PLKB/PKB/Petugas KB Desa/PPKBD/Sub PPKBD
2. ARSIP

KARTU DATA POTENSI KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA)

A. DATABASIS KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA

Tahun : ....
Provinsi : .... Kode Provinsi : ☐☐
Kabupaten/Kota : .... Kode Kabupaten/Kota : ☐☐ ☐☐
Kecamatan : .... Kode Kecamatan : ☐☐ ☐☐ ☐☐
Desa/Kelurahan : .... Kode Desa/Kelurahan : ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
RW/Dusun : .... RW/Dusun : ☐☐☐
RT : .... RT : ☐☐☐
Nama Kelompok : ....
Alamat : ....

B. INFORMASI KELOMPOK

SK Pengukuhan	
Ya	Tidak
1	2
No. SK :	
Tgl. SK :	
Oleh :	

Stratifikasi Kelompok			Keterpaduan Kelompok	
Dasar	Berkem bang	Pari purna	Ekonomi Produktif	Lain nya
3	4	5	6	7

Sarana Penyuluhan (Buku Penyuluhan BKR)	
Ada	Tidak
8	9

Sumber Dana Kegiatan BKR			
APBN	APBD	Swa daya	Lain nya
10	11	12	13

C. INFORMASI PENGELOLA DAN KADER BKR

Jabatan Kader	Nama Kader	Pen didikan	Pernah Mendapat Pelatihan BKR		Peker jaan	Masih Status PUS	Keser taan ber-KB
			Sudah	Belum			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ketua							
Sekretaris							
Bendahara							
Anggota	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						

D. INFORMASI KELUARGA SASARAN DAN PESERTA BKR

Sasaran Keluarga Yang Mempunyai Remaja	Jumlah Keluarga Yang Mempunyai Remaja	Jumlah Keluarga Yang Mempunyai Remaja Menjadi Anggota Kelompok BKR	Jumlah Keluarga Anggota Kelompok BKR Yang Masih Berstatus PUS	Keluarga Anggota BKR Yang Menjadi Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi							
				IUD	MOW	MOP	KON DOM	IM PLAN	SUN TIK	PIL	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pra S & KS I											
Seluruh Tahapan KS											

E. INFORMASI KEGIATAN PENYULUHAN BKR

Materi Pertemuan	Pemberian Materi		Ada Diskusi	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	2	3	4	5
1. Peran Orang Tua Dalam Pembinaan Anak Remaja				
2. Tumbuh Kembang Remaja				
3. Penanaman Nilai-Nilai Moral Kepada Remaja				
4. Kesehatan Reproduksi Anak Remaja				
5. Narkoba dan Minuman Keras				
6. HIV/AIDS				
7. Pemenuhan Gizi Anak Remaja				
8. Keterampilan/Kecakapan Hidup Anak Remaja				

Catatan : Laporan ini diserahkan kepada PLKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya tanggal 3 Januari

................., ...
Ketua Kelompok BKR ....

(...............................)

Keterangan Cara Pengisian Formulir : K/0/BKR/10

A. Databasis Kelompok Bina Keluarga Remaja

1.	Tahun	:	Diisi dengan tahun saat mengisi K/0/BKR/10
2.	Provinsi	:	Diisi nama provinsi dengan huruf cetak dan untuk kode provinsi diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
3.	Kabupaten/Kota	:	Diisi nama kabupaten/kota dengan huruf cetak dan untuk kode kab/kota diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
4.	Kecamatan	:	Diisi nama kecamatan dengan huruf cetak dan untuk kode kecamatan diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
5.	Desa/Kelurahan	:	Diisi nama desa/kelurahan dengan huruf cetak dan untuk kode desa/kelurahan diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
6.	RW/Dusun	:	Diisi dengan RW/Dusun tempat penyelenggaraan Kegiatan BKR
7.	RT	:	Diisi dengan RT tempat penyelenggaraan Kegiatan BKR
8.	Nama Kelompok	:	Diisi dengan nama kelompok BKR dengan huruf cetak

9.	Alamat		:	Diisi dengan alamat Kelompok BKR

B. Informasi Kelompok

1.	SK Pengukuhan	- Ya	:	Diisi dengan tanda centang (√) pada kolom 1 jika memiliki SK Pengukuhan
		- Tidak	:	Diisi dengan tanda centang (√) pada Kolom 2 jika tidak memiliki SK Pengukuhan
2.	Stratifikasi Kelompok	- Dasar	:	Diisi oleh PLKB/PKB dengan tanda centang (√) pada kolom 3 jika memiliki pengurus 1 orang, jumlah kader/fasilitator 2 orang dan yang sudah dilatih minimal 50%, pertemuan penyuluhan minimal 1 kali perbulan tetapi belum ada konseling, pusat informasi dan pelayanan belum ada konselor, buku pedoman ada tapi belum lengkap, media penyuluhannya belum ada, media interaksi BKR belum dimanfaatkan, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain belum dilaksanakan, dan belum ada pendanaan dari masyarakat

- Berkembang : Diisi oleh PLKB/PKB dengan tanda centang (√) pada kolom 4 jika memiliki pengurus 1-2 orang, jumlah kader/fasilitator 3-4 orang dan yang sudah dilatih 50-75%, pertemuan penyuluhan 1-2 kali per bulan dan sudah ada konseling, pusat informasi dan pelayanan sudah ada konselor, buku pedoman ada lengkap, media penyuluhannya ada, media interaksi BKR sudah dimanfaatkan, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain belum dilaksanakan, dan pendanaan dari masyarakat kurang dari 50%
- Paripurna : Diisi oleh PLKB/PKB dengan tanda centang (√) pada kolom 5 jika memiliki lebih dari 2 orang, jumlah kader/fasilitator lebih dari 4 orang dan yang sudah dilatih lebih dari 75%, pertemuan penyuluhan lebih dari 2 kali per bulan dan sudah ada konseling, pusat informasi dan pelayanan sudah ada konselor, buku pedoman ada lengkap dan ada

			pengembangan, media penyuluhannya sudah ada pengembangan, media interaksi BKR sudah dimanfaatkan dan ada pengembangan, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain sudah dilaksanakan, dan pendanaan dari masyarakat lebih dari 50%
3.	Keterpaduan Kelompok	- Kolom 6-7	: Diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai (Ekonomi Produktif, Lainnya)
4.	Sarana Penyuluhan	- Kolom 8-9	: Diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai (Ada, Tidak)
5.	Sumber Dana Kegiatan BKR	- Kolom 10-13	: Diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai (APBN, APBD, Swadaya, Sumber Lainnya)

C. Informasi Pengelola dan Kader BKR

1.	Jabatan Kader	Kolom 1	: Berisi jabatan kader yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan anggota
2.	Nama Kader	Kolom 2	: Diisi dengan nama kader dan disesuaikan dengan jabatan kader (kolom 1)
3.	Pendidikan	Kolom 3	: Diisi kode yang sesuai dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh kader

				(1) Tidak Tamat SD, (2) Tamat SD, (3) Tamat SLTP, (4) Tamat SLTA , (5) Tamat Akademi/Perguruan Tinggi
4.	Pernah Mendapatkan Pelatihan BKR	Kolom 4 & 5	:	Diisi dengan tanda centang (√) pada kolom 4 jika kader pernah mendapatkan pelatihan dan tanda centang (√) pada kolom 5 jika belum pernah mendapatkan pelatihan
5.	Pekerjaan	Kolom 6	:	Diisi pekerjaan kader dengan kode yang sesuai. (0) Tidak Bekerja, (1) Petani, (2) Nelayan, (3) Pedagang, (4) PNS , (5) TNI/Polisi, (6) Pegawai Swasta, (7) Wiraswasta, (8) Lainnya
6.	Masih Status PUS	Kolom 7	:	Diisi dengan tanda centang (√) jika kader masih Status PUS (berusia antara 15-49) dan diisi dengan strip (-) jika bukan PUS
7.	Kesertaan Ber KB	Kolom 8	:	Diisi dengan kode alat kontrasepsi sesuai dengan alat kontrasepsi yang digunakan oleh kader, yaitu: IUD=I, MOW=OW, MOP=OP, Kondom =K, Implan = IP, Suntik = S, PIL=P

D. Informasi Keluarga Sasaran dan Peserta BKR

No.	Uraian	Kolom	Keterangan
1.	Sasaran Keluarga Yang Mempunyai Remaja	Kolom 1	: Berisi sasaran keluarga yang mempunyai remaja menurut Tahapan KS Pra S dan KS I, seluruh tahapan KS (Pra S, KS I, KSII, KS III, KS III+)
2.	Jumlah Keluarga Yang Mempunyai Remaja	Kolom 2	: Diisi dengan jumlah keluarga yang memiliki remaja sesuai dengan tahapan KS sasaran keluarga yang memiliki remaja (kolom1)
3.	Jumlah Keluarga Yang Mempunyai Remaja Menjadi Anggota BKR	Kolom 3	: Diisi dengan jumlah keluarga yang mempunyai remaja menjadi anggota BKR sesuai dengan tahapan KS sasaran keluarga yang memiliki remaja (kolom1)
4.	Jumlah Keluarga Anggota BKR Yang Masih Berstatus PUS	Kolom 4	: Diisi dengan jumlah keluarga anggota BKR yang masih berstatus PUS sesuai dengan tahapan KS sasaran keluarga yang memiliki remaja (kolom1)
5.	Keluarga BKR Yang Menjadi Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi	Kolom 5-12	: Diisi dengan jumlah keluarga anggota BKR yang menjadi peserta KB menurut metode kontrasepsi yang digunakan

E. Informasi Kegiatan Penyuluhan BKR

No.	Informasi		Keterangan		Penjelasan
1.	Materi Pertemuan		Kolom 1	:	Berisikan tema materi yang diberikan pada penyuluhan BKR
2.	Pemberian Materi	-	Ya	:	Diisi dengan tanda centang (√) pada kolom 2 jika materi diberikan
		-	Tidak	:	Diisi dengan tanda centang (√) pada kolom 3 jika materi tidak diberikan
3.	Ada Diskusi	-	Ya	:	Diisi dengan tanda centang (√) pada kolom 4 jika dalam kegiatan dilakukan diskusi
		-	Tidak	:	Diisi dengan tanda centang (√) pada kolom 5 jika dalam kegiatan tidak dilakukan diskusi

C/I/BKR/10

CATATAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA)

Nama Kelompok Kegiatan BKR : ....
Nama Ketua Kelompok BKR : ....
Petugas Yang Membina : ....
Tahun : ....

Kode Wilayah

Provinsi : ....
Kab/Kota : ....
Kecamatan : ....
Desa/Kelurahan : ....
Dusun/RW : ....
RT : ....

NO.	U R A I A N	B U L A N											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jumlah keluarga yang menjadi **Sasaran Kelompok** kegiatan BKR												
2	Jumlah keluarga yang menjadi **Anggota Kelompok** kegiatan BKR												
3	Jumlah Keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR **Hadir/Aktif** dalam pertemuan/penyuluhan												
4	**Status PUS**												
	a. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKR yang masih berstatus **PUS**												
	b. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKR yang masih berstatus **PUS Keluarga Pra S dan KS I**												
5	**Kesertaan Ber KB**												
	a. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi **Peserta KB**												
	b. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi Peserta KB **Keluarga Pra S dan KS I**												
6	Jumlah pertemuan/penyuluhan												
7	Jumlah kader kelompok kegiatan BKR yang Ada												
PARAF KETUA KELOMPOK													
PARAF Sub PPKBD													

Keterangan Cara Pengisian Formulir : C/I/BKR/10

A.	**Data Kelompok**		
1	Nama Kelompok Kegiatan BKR	:	Diisi dengan nama kelompok kegiatan BKR dengan huruf cetak
2	Nama Ketua Kelompok Kegiatan BKR	:	Diisi dengan nama ketua kelompok kegiatan BKR dengan huruf cetak
3	Petugas Yang Membina	:	Diisi dengan nama petugas yang membina kelompok kegiatan BKR dengan huruf cetak
4	Tahun	:	Diisi dengan tahun saat mengisi C/I/BKR/10
5	Provinsi	:	Diisi nama provinsi dengan huruf cetak dan untuk kode provinsi diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
6	Kabupaten/Kota	:	Diisi nama kabupaten/kota dengan huruf cetak dan untuk kode kab/kota diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
7	Kecamatan	:	Diisi nama kecamatan dengan huruf cetak dan untuk kode kecamatan diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
8	Desa/Kelurahan	:	Diisi nama desa/kelurahan dengan huruf cetak dan untuk kode desa/kelurahan diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri

9	RW/Dusun		:	Diisi dengan RW/Dusun tempat penyelenggaraan Kegiatan BKR
10	RT		:	Diisi dengan RT tempat penyelenggaraan Kegiatan BKR
B	**Data Tabel**			
1	Jumlah Keluarga Yang Menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKR	Kolom 3-14	:	Diisi dengan angka yang menunjukkan hasil penjumlahan keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKR sesuai bulan kegiatan
2	Jumlah Keluarga Yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan BKR	Kolom 3-14	:	Diisi dengan angka keluarga yang menunjukkan hasil penjumlahan keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR sesuai bulan kegiatan
3	Jumlah Keluarga Yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan BKR Hadir/Aktif dalam Peretemuan/Penyuluhan	Kolom 3-14	:	Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan pada bulan kegiatan
4.a	Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan BKR Yang Masih Berstatus PUS	Kolom 3-14	:	Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang masih berstatus PUS pada bulan kegiatan

4.b	Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan BKR Yang Masih Berstatus PUS Keluarga Pra S dan KS I	Kolom 3-14	:	Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang masih berstatus PUS dari Keluarga Pra S dan KS I pada bulan kegiatan
5.a	Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan BKR Yang Menjadi Peserta KB	Kolom 3-14	:	Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi peserta KB pada bulan kegiatan
5.b	Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan BKR Yang Menjadi Peserta KB Keluarga Pra S dan KS I	Kolom 3-14	:	Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi peserta KB dari keluarga Pra S dan KS I pada bulan kegiatan
6	Jumlah Pertemuan/Penyuluhan	Kolom 3-14	:	Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah pertemuan/penyuluhan sesuai pada bulan kegiatan
7	Jumlah Kader Kelompok Kegiatan BKR Yang Ada	Kolom 3-14	:	Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Kader BKR yang ada sesuai pada bulan kegiatan
8	Paraf Ketua Kelompok	Kolom 3-14	:	Diisi dengan paraf ketua kelompok BKR setelah selesai mengisi formulir ini setiap bulan

9	Paraf Sub PPKBD	Kolom 3-14	:	Diisi dengan paraf Ketua Sub PPKBD di wilayah yang bersangkutan setelah selesai memindahkan data setiap bulan

F/I/Dal/10

1. PPLKB/Petugas KB Kecamatan
2. A r s i p

LAPORAN BULANAN PENGENDALIAN LAPANGAN TINGKAT DESA/KELURAHAN
SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA)

BULAN : ....
DESA/KELURAHAN : ....
KECAMATAN : ....

TAHUN : 2010
NO. KODE DESA/KELURAHAN : | | | | | | | | | | |
NO. KODE KECAMATAN : | | | | | | |

I. KEADAAN UMUM

NO	U R A I A N	JUMLAH YANG ADA	JUMLAH YANG DILAPORKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	P P K B D		
2	Sub P P K B D		
3	Kelompok KB		
4	Kelompok Kegiatan BKB		
5	Kelompok Kegiatan BKR		
6	Kelompok Kegiatan BKL		
7	Kelompok Kegiatan UPPKS		

II. KEGIATAN OPERASIONAL

NO	U R A I A N	J U M L A H
(1)	(2)	(3)
1	Frekwensi Rakor Program KB tingkat Desa/Kelurahan	
2	Frekwensi Penyuluhan oleh PLKB/PKB	
3	Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit	
4	Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama/Adat yang Aktif melakukan KIE KB	

III. PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

NO	U R A I A N	BKB	BKR	BKL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kiegiatan			
2	Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan			
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam peretemuan/ penyuluhan			
4	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS			
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS Keluarga Pra S dan KS I			
6	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi Peserta KB			
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi Peserta KB Keluarga Pra S dan KS I			
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan			
9	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KKA			

IV. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	U R A I A N	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS :	
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS	
	b. Jumlah anggota kelompk UPPKS Keluarga Pra S dan KS I	
2	Status KB Anggota Kelompok UPPKS :	
2.1	Anggota dari Seluruh Tahapan KS	
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS	
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS ber KB	
2.2	Anggota dari Tahapan Pra S dan KS I	
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS	
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS ber KB	
3	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS	

NO	U R A I A N	JUMLAH SUMBER MODAL	JUMLAH MODAL (Rp.)
4	Jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dan jumlahnya pada bulan ini :		Rp
	a. APBN		Rp
	b. APBD		Rp
	c. Krista		Rp
	d. KUR		Rp
	e. PNPM		Rp
	f. Lainnya		Rp

V. PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER KB

NO	U R A I A N	PELAYANAN PEMERINTAH	PELAYANAN SWASTA	SELURUH TAHAPAN KS	TAHAPAN PRA S & KS I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)				
2	Jumlah Peserta KB Aktif :				
	a. IUD (I)				
	b. MOW (OW)				
	c. MOP (OP)				
	d. KONDOM (K)				
	e. IMPLAN (IP)				
	f. SUNTIK (S)				
	g. PIL (P)				
3	Jumlah Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB :				
	a. Hamil (H)				
	b. Ingin Anak Segera (IAS)				
	c. Ingin Anak Ditunda (IAT)				
	d. Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)				

CATATAN : Laporan ini harus sudah diterima di Kecamatan wilayah setempat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

............................,....................................

PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan ....

(...)

Keterangan Cara Pengisian Formulir : F/I/Dal/10

	Sumber Data Pengisian Formulir Ini Dari		:	C/I/Des-Dal/10
A.	**Data Wilayah**			
1	Bulan		:	Diisi dengan bulan saat mengisi Rek.Prov.F/I/Dal/10
2	Desa/Kelurahan		:	Diisi nama desa/kelurahan dengan huruf cetak
3	Kecamatan		:	Diisi nama kecamatan dengan huruf cetak
4	Tahun		:	Diisi dengan tahun saat mengisi F/I/Dal/10
5	No. Kode Desa/Kelurahan		:	Diisi dengan kode desa/kelurahan diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
6	No. Kode Kecamatan		:	Diisi dengan kode kecamatan sesuai dengan kode Depdagri
B.	**Data Tabel I. Keadaan Umum**			
1	PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB	Kolom 3-4	:	Diisi dengan angka jumlah PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB yang ada dan dilaporkan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
2	Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS	Kolom 3-4	:	Diisi dengan angka jumlah kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang ada dan dilaporkan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan

C. Data Tabel II. Kegiatan Operasional

1	Frekwensi Rakor Program KB Tingkat Desa/Kelurahan	Kolom 3	:	Diisi dengan angka frekwensi Rakor Program KB di tingkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan
2	Frekwensi Penyuluhan oleh PLKB/PKB	Kolom 3	:	Diisi dengan angka frekwensi Penyuluhan oleh PLKB/PKB di tingkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan
3	Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit	Kolom 3	:	Diisi dengan angka frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
4	Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama/Adat yang aktif melakukan KIE KB	Kolom 3	:	Diisi dengan angka jumlah tokoh masyarakat/agama/adat yang aktif melakukan KIE KB di Desa/Kelurahan yang bersangkutan

D. Data Tabel III. Pembinaan Ketahanan Keluarga

1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	Kolom 3-6	:	Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, BLK di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	Kolom 3-6	:	Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, BLK di Desa/Kelurahan yang bersangkutan

3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	Kolom 3-6	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, BLK yang hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
4	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS	Kolom 3-6	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, BLK yang berstatus PUS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
5	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS Keluarga Pra S dan KS I	Kolom 3-6	: Diisi dengan angka jumlah keluarga Pra S dan KS I anggota kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, BLK yang berstatus PUS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
6	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	Kolom 3-6	: Diisi dengan angka jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, BLK yang menjadi peserta KB di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB Keluarga Pra S dan KS I	Kolom 3-6	: Diisi dengan angka jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, BLK yang menjadi peserta KB

				keluarga Pra S dan KS I di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	Kolom 3-6	:	Diisi dengan angka jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, BLK di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
9	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KKA	Kolom 3-6	:	Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KKA di Desa/Kelurahan yang bersangkutan

E. Data Tabel IV. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah Keluarga Yang Menjadi Anggota Kelompok UPPKS

a. Jumlah anggota kelompok UPPKS	Kolom 3	:	Diisi dengan angka jumlah anggota kelompok UPPKS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
b. Jumlah anggota kelompok UPPKS Keluarga Pra S dan KS I	Kolom 3	:	Diisi dengan angka jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I di Desa/Kelurahan yang bersangkutan

2. Status KB dari Anggota UPPKS

Anggota Keseluruhan			
a. Jumlah Anggota Kelompok UPPKS Yang Status PUS	Kolom 3	:	Diisi dengan angka jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
b. Jumlah Anggota Kelompok UPPKS yang Status PUS ber KB	Kolom 3	:	Diisi dengan angka jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS menjadi peserta KB di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
Anggota Khusus dari Kelompok Pra S dan KS I			
a. Jumlah Anggota Kelompok UPPKS Keluarga Pra S dan KS I yang Status PUS	Kolom 3	:	Diisi dengan angka jumlah anggota kelompok UPPKS Keluarga Pra S dan KS I yang berstatus PUS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
b. Jumlah PUS Anggota Kelompok UPPKS Keluarga Pra S dan KS I yang Ber KB	Kolom 3	:	Diisi dengan angka jumlah PUS anggota kelompok UPPKS Keluarga Pra S dan KS I yang Ber KB di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
3. Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS	Kolom 3	:	Diisi dengan angka jumlah pertemuan kelompok UPPKS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
4. Jumlah Kelompok UPPKS yang Memperoleh/Mengakses			

bantuan Modal dan Jumlahnya Pada Bulan Ini:

a. APBN	Kolom jumlah-modal	:	Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari APBN dan jumlahnya di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
b. APBD	Kolom jumlah-modal	:	Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari APBD dan jumlahnya di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
c. KRISTA	Kolom jumlah-modal	:	Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari KRISTA dan jumlahnya di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
d. KUR	Kolom jumlah-modal	:	Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari KUR dan jumlahnya di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
e. PNPM	Kolom jumlah-modal	:	Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses

			bantuan modal dari PNPM dan jumlahnya di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
f. LAINNYA	Kolom jumlah-modal	:	Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari sumber lainnya dan jumlahnya di Desa/Kelurahan yang bersangkutan

F. Data Tabel V. Pembinaan PUS dan Kesertaan Ber KB

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Kolom 5-6	:	Diisi dengan angka jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) seluruh tahapan keluarga dan keluarga Pra S dan KS I di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
2. Jumlah Peserta KB Aktif			
	Kolom 3-4	:	Diisi dengan angka jumlah peserta KB aktif per metode kontrasepsi melalui jalur pelayanan pemerintah dan swasta di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
	Kolom 5-6	:	Diisi dengan angka jumlah peserta KB aktif per metode kontrasepsi menurut kelompok tahapan KS (seluruh tahapan KS dan tahapan keluarga Pra S dan KS I) di Desa/Kelurahan yang bersangkutan

3. Jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB

a. Hamil	Kolom 5-6	:	Diisi dengan angka jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB karena hamil, dari seluruh tahapan KS dan tahapan keluarga Pra S dan KS I di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
b. Ingin Anak Segera	Kolom 5-6	:	Diisi dengan angka jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB karena ingin anak segera, dari seluruh tahapan KS dan tahapan keluarga Pra S dan KS I di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
c. Ingin Anak Ditunda	Kolom 5-6	:	Diisi dengan angka jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB karena ingin anak ditunda, dari seluruh tahapan KS dan tahapan keluarga Pra S dan KS I di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
d. Tidak Ingin Anak Lagi	Kolom 5-6	:	Diisi dengan angka jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB karenatidak ingin anak lagi, dari seluruh tahapan KS dan tahapan keluarga Pra S dan KS I di Desa/Kelurahan yang bersangkutan

R/I/BKR/10

REGISTER KELUARGA YANG MEMPUNYAI REMAJA
SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA)

Nama Kelompok Kegiatan BKR : ....
Nama Ketua Kelompok Kegiatan BKR : ....
Petugas Yang Membina : ....
Tahun : ....

Kode Wilayah

Propinsi : ....
Kab/Kota : ....
Kecamatan : ....
Desa/Kelurahan : ....
Dusun/RW : ....
RT : ....

No	NAMA KELUARGA YANG MEMPUNYAI REMAJA	TAHAPAN KS	KESERTAAN DALAM KELOMPOK BKR	MASIH STATUS PUS	KESERTAAN BER KB	HADIR DALAM PERTEMUAN PER BULAN											
			YA	YA	YA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Keluarga Pra S dan KS I																	
Jumlah Seluruh Tahapan KS																	
PARAF Ketua Kelompok																	

Keterangan Cara Pengisian Formulir : R/I/BKR/10

A. Data Kelompok

No	Uraian		Keterangan
1	Nama Kelompok Kegiatan BKR	:	Diisi dengan nama kelompok kegiatan BKR dengan huruf cetak
2	Nama Ketua Kelompok Kegiatan BKR	:	Diisi dengan nama ketua kelompok kegiatan BKR dengan huruf cetak
3	Petugas Yang Membina	:	Diisi dengan nama petugas yang membina kelompok kegiatan BKR dengan huruf cetak
4	Tahun	:	Diisi dengan tahun saat mengisi R/I/BKR/10
5	Provinsi	:	Diisi nama provinsi dengan huruf cetak dan untuk kode provinsi diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
6	Kabupaten/Kota	:	Diisi nama kabupaten/kota dengan huruf cetak dan untuk kode kab/kota diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
7	Kecamatan	:	Diisi nama kecamatan dengan huruf cetak dan untuk kode kecamatan diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
8	Desa/Kelurahan	:	Diisi nama desa/kelurahan dengan huruf cetak dan untuk

				kode desa/kelurahan diisi oleh PLKB sesuai dengan kode Depdagri
9	RW/Dusun		:	Diisi dengan RW/Dusun tempat penyelenggaraan Kegiatan BKR
10	RT		:	Diisi dengan RT tempat penyelenggaraan Kegiatan BKR

B. Data Tabel

1	Nomor	Kolom 1	:	Diisi nomor urut nama keluarga yang mempunyai remaja
2	Nama Keluarga Yang Mempunyai Remaja	Kolom 2	:	Diisi nama keluarga yang mempunyai remaja
3	Tahapan KS	Kolom 3	:	Diisi dengan tahapan KS hanya untuk tahapan Pra S dan KS I
4	Kesertaan Dalam Kelompok BKR	Kolom 4	:	Diisi dengan tanda centang (√) jika menjadi anggota BKR
5	Masih Status PUS	Kolom 5	:	Diisi dengan tanda centang (√) jika masih berstatus PUS
6	Kesertaan Ber KB	Kolom 6	:	Diisi dengan kode alokon KB yang sesuai dengan yang digunakan oleh PUS bersangkutan

No	Uraian	Kolom		Keterangan
7	Hadir Dalam Pertemuan Per Bulan	Kolom 7-18	:	Diisi dengan tanda centang (√) jika hadir dalam bulan pertemuan
8	Baris Jumlah Keluarga Pra S dan KS I	Kolom 4-6	:	Diisi dengan angka penjumlahan hasil pengisian dari baris atas ke bawah untuk keluarga Pra S dan KS I pada masing-masing kolom
9	Baris Jumlah Seluruh Tahapan Keluarga	Kolom 4-6	:	Diisi dengan angka penjumlahan hasil pengisian dari baris atas ke bawah untuk seluruh tahapan keluarga pada masing-masing kolom
10	Baris Jumlah Hadir Dalam Pertemuan Per Bulan	Kolom 7-18	:	Diisi dengan angka penjumlahan hasil pengisian dari baris atas ke bawah untuk anggota yang hadir dalam pertemuan per bulan pada masing-masing kolom
11	Paraf Ketua Kelompok	Kolom 7-18	:	Diisi dengan paraf ketua kelompok pada masing-masing kolom